

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan antar perusahaan semakin ketat dan menuntut perusahaan untuk tetap bertahan dan lebih unggul dibanding perusahaan yang lain. Untuk itu, perusahaan harus selalu berinovasi dan mengikuti perkembangan secara global. Perusahaan yang ingin tumbuh dan berkembang pasti membutuhkan modal. Menurut Ahyuni, Rizal dan Wibisono (2018) sumber dana dalam setiap perusahaan dapat berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Ahyuni, Rizal dan Wibisono (2018) menambahkan bahwa dana yang bersumber dari dalam perusahaan berupa laba ditahan, yakni laba yang belum dibagikan oleh pemegang saham atau keuntungan perusahaan yang masih ditahan, sedangkan dana dari luar perusahaan didapatkan dari para kreditur atas pemberian pinjaman berupa hutang.

Selain manajemen perusahaan, pengelolaan utang menjadi hal yang penting untuk dicermati perusahaan. Dalam pemberian pinjaman seperti utang, kreditor akan memperhitungkan *default risk* dalam perusahaan. Salah satu cara kreditor mengantisipasi *default risk* adalah dengan membebankan sejumlah tingkat bunga kepada debitur (Prasetyo dan Raharja, 2013). Menurut Zahro, Afifudin dan Mawardi (2018) biaya utang merupakan tingkat bunga yang diterima oleh kreditur sebagai tingkat pengembalian yang disyaratkan.

Banyak perusahaan yang menggunakan sumber modal eksternal untuk memenuhi kebutuhan operasi usaha atau untuk modal investasi. Hal ini

menyebabkan perusahaan akan memiliki hutang yang tergolong tidak sedikit. Tingginya tingkat hutang suatu perusahaan mengakibatkan biaya utang meningkat. Besarnya biaya hutang tersebut ditentukan oleh kreditor, jika suatu perusahaan menanggung biaya utang yang tinggi, kemungkinan mereka akan mengalami *financial distress* (Woo, Kang dan Lee, 2017). Menurut Nazar Nurdin yang dikutip melalui kompas.com keadaan dimana perusahaan tidak dapat melakukan pengelolaan biaya utang membuat perusahaan kemungkinan akan mengalami kebangkrutan atau pailit.

Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia menyangkut biaya utang adalah perusahaan keluarga PT Nyonya Meneer yang dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang karena terlilit utang yang mencapai angka puluhan miliar rupiah. Perusahaan yang lahir tahun 1919 ini digugat pailit karena bersangkutan dengan 35 kreditur dan total hutang mencapai 89 miliar rupiah. Selain dinyatakan pailit, aset yang dimiliki PT Nyonya Meneer juga harus dibekukan untuk kemudian dikelola kurator. Nantinya kurator juga akan melakukan proses investigasi, untuk mendata seberapa banyak utang-utang dari pihak kreditur yang harus dilunasi. Setelah semua diketahui, aset akan dijual dengan cara dilelang. Hasil lelang itulah akan diberikan kepada kreditur dan karyawan (sumber: www.merdeka.com).

Selain itu, perusahaan lain yang mengalami kasus serupa di Indonesia adalah PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK) telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Diketahui DAJK memiliki utang terhadap beberapa perbankan yang jumlahnya mencapai Rp 870,17 miliar. Utang

perbankan tersebut masuk dalam liabilitas jangka panjang perseroan yang mencapai Rp 913,3 miliar. Akibatnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memutuskan untuk memberhentikan perdagangan saham PT DAJK (sumber: www.finance.detik.com).

Tidak hanya di Indonesia, perusahaan diluar negeri contohnya General Maritime Corp juga mengalami kebangkrutan. General Maritime mengambil pinjaman yang cukup besar untuk membeli 7 tanker senilai US\$ 620 juta namun General Maritime Corp gagal untuk membayar pinjaman sehingga mencari investor untuk membiayai utang yang ada. Perusahaan berhasil mendapatkan pinjaman US\$ 200 juta, tapi tidak cukup untuk bertahan sehingga akhirnya mendaftarkan kebangkrutan (sumber: www.finance.detik.com).

Berdasarkan dari beberapa kasus di atas, permasalahan terjadi karena manajemen tidak mampu membayar kewajibannya. Dalam kontrak atas utang terdapat *agency problem* antara pemegang saham, manajemen dan kreditur. Manajemen memiliki kewajiban untuk melunasi bunga beserta pokoknya kepada kreditur yang memiliki klaim atas aset perusahaan. Namun, manajemen juga dikontrak oleh pemegang saham untuk dapat memberikan *return* atau deviden kepada pemegang saham (Septian dan Panggabean, 2014).

Dalam penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa penelitian terkait dengan biaya utang. Diantaranya penelitian yang dilakukan Tee (2017) di Malaysia, Alzoubi (2017) di Yordania, Chiu dan Wang (2019) di Taiwan, Lagaras dan Tsoutsoura (2015) di Amerika Serikat, Causholli dan Knechel (2012) di Amerika Serikat, Boubakri dan Ghouma (2010) di Eropa dan Asia, Robiansyah,

Novita dan Ranidiah (2019) di Indonesia, Swissia dan Purba (2018) di Indonesia, Octafilia dan Sandika (2018) di Indonesia, Adam, Mukhtaruddin, Soraya dan Yusrianti (2015) di Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini dan diduga dapat mempengaruhi biaya utang antara lain adalah kualitas audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan keluarga.

Kualitas audit adalah ketika auditor memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji atau kecurangan dalam laporan keuangan (Heryanto, Laela dan Dewi, 2019). Kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya utang yang ditanggung perusahaan. Kualitas audit dapat dilihat dengan penggunaan KAP *Big Four* yang berarti penggunaan KAP *Big Four* akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas yang dapat secara cermat menentukan biaya utang yang sebenarnya ditanggung perusahaan (Samhudi, 2016), (Nugroho dan Meiranto, 2014).

Kreditur menganggap perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* memiliki kualitas laporan keuangan terpercaya sehingga berdampak pada biaya utang perusahaan dan memberikan bunga pinjaman lebih rendah (Robiansyah, Novita, dan Ranidiah, 2019). Pernyataan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Causholli dan Knechel (2012) yang menyatakan bahwa kualitas audit memiliki peranan penting dalam menurunkan biaya utang perusahaan.

Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Octafilia dan Sandika (2018), dan Septian dan Panggabean (2014) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. Menurut Agustiawan (dalam Octafilia dan Sandika, 2018) perusahaan memilih menggunakan KAP *big-four*

karena memiliki reputasi yang baik tetapi tidak secara langsung mengakibatkan biaya utang menjadi kecil. Laporan keuangan yang di audit oleh KAP *big-four* tidak menjamin perusahaan mendapatkan biaya utang yang kecil. (Octafilia dan Sandika, 2018) juga menambahkan bahwa tidak hanya KAP yang menjadi pertimbangan kreditor melainkan ada faktor lain yang lebih penting.

Selain kualitas audit, Nasr, Boubaker dan Rouatbi (2015) menyatakan bahwa struktur kepemilikan suatu perusahaan dapat mempengaruhi biaya utang. Sebagian besar perusahaan publik dikuasai pihak institusi. Kepemilikan institusional adalah persentase kepemilikan yang dimiliki oleh sebuah institusi atau lembaga keuangan maupun pemerintah di suatu perusahaan (Agustami dan Yunanda, 2014).

Dalam hasil penelitian yang dilakukan Rebecca dan Siregar (2012), Meiriasari (2017), Tee (2017), Swissia dan Purba (2018) Agustami dan Yunanda (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya utang. Arah hubungan yang ditunjukkan adalah negatif yang artinya dengan adanya kepemilikan institusional dapat menurunkan biaya utang. Hal ini dikarenakan pihak investor institusional diyakini memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memonitor tindakan pihak manajemen sehingga mendorong pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Samhudi (2016) dan Nabela (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya biaya hutang perusahaan. Arah hubungan yang ditunjukkan adalah positif/searah yang artinya dengan bertambahnya kepemilikan institusional

akan meningkatkan biaya utang. Semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh institusi, maka semakin efektif pula mekanisme kontrol terhadap kinerja manajemen, yang tentu saja akan menarik perhatian dan kepercayaan masyarakat sehingga aktivitas penghimpunan dana perusahaan akan mendorong peningkatan biaya utang perusahaan.

Sementara, hasil penelitian yang dilakukan Robiansyah, Novita dan Ranidiah (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap biaya utang. Persentase kepemilikan institusional yang cukup besar tidak mampu menjadi pengontrol atas penggunaan hutang, karena pihak manajemen dianggap lebih mengetahui langkah apa yang harus diambil dalam proses keputusan investasi, kepemilikan institusional hanya dijadikan pengawas terhadap kinerja manajemen sehingga dapat mengurangi konflik keagenan antara *agent* dan *principal*.

Selain kepemilikan institusional, hasil penelitian yang dilakukan Chiu dan Wang (2019) dan Boubakri dan Ghouma (2010) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh terhadap biaya utang. Arah hubungan yang ditunjukkan adalah positif yang artinya dengan adanya kepemilikan keluarga akan meningkatkan biaya utang. Menurut Boubakri dan Ghouma (2010) perusahaan keluarga cenderung menggunakan utang dalam membiayai kebutuhan perusahaan daripada menerbitkan saham baru karena mereka ingin melindungi kontrol yang dimiliki terhadap perusahaan.

Akibatnya, tingkat utang perusahaan menjadi tinggi dan risiko yang harus ditanggung perusahaan juga menjadi lebih besar sehingga pihak kreditor

mengantisipasi dengan memberikan biaya utang yang lebih tinggi. Hasil penelitian Chiu dan Wang (2019) menyimpulkan bahwa perusahaan keluarga di Taiwan membayar bunga lebih banyak kepada bank daripada perusahaan dengan kontrol kepemilikan non keluarga.

Hasil penelitian yang dilakukan Swisia dan Purba (2018) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh terhadap biaya utang. Arah hubungan yang ditunjukkan adalah negatif yang artinya kepemilikan keluarga dapat menurunkan biaya utang. Kinerja perusahaan keluarga dianggap lebih efisien dikarenakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan seharusnya lebih kecil. Selain itu, keluarga dapat mengelola perusahaan dan mengontrol perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan salah satu contohnya dalam melakukan kegiatan peminjaman terhadap pihak luar.

Namun, penelitian yang dilakukan Meiriasari (2017) Nugroho dan Meiranto (2014) Septian dan Panggabean (2014) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. Hal ini terjadi karena kepemilikan keluarga memberikan risiko yang lebih besar kepada investor dibandingkan dengan kreditor sehingga cenderung tidak mempengaruhi keputusan kreditor.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, masih terdapat inkonsistensi pada penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini menjadi salah satu fenomena yang menarik untuk diteliti. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan tahun penelitian yang lebih baru untuk menguji pengaruh kualitas audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga terhadap biaya utang.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Tee (2017) di Malaysia, Chiu dan Wang (2019) di Taiwan dan Causholli dan Knechel (2012) di Amerika Serikat. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Pertama perbedaan penelitian ini dengan Tee (2017) di Malaysia adalah penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu kualitas audit dan kepemilikan keluarga. Variabel independen pada penelitian Tee (2017) adalah koneksi politik.

Alasan peneliti tidak menggunakan variabel independen koneksi politik adalah akses perusahaan khususnya manufaktur yang memiliki koneksi politik belum terbuka. Menurut Wirawan dan Diyanty (2014) dalam mencari data tentang koneksi politik dalam suatu perusahaan harus dilakukan pencarian secara komprehensif. Kemudian beberapa perusahaan *go public* yang memiliki koneksi politik telah dinyatakan bangkrut contohnya PT Bali Turtle Island Development, perusahaan milik Bambang Trihatmojo (Putra Mantan Presiden Soeharto) (www.putusan.mahkamahagung.go.id) kemudian perusahaan yang berafiliasi dengan Bakrie Brothers yaitu PT BNBR yang sahamnya disuspensi lantaran adanya penurunan harga kumulatif yang signifikan (www.finance-detik.com).

Kemudian peneliti tertarik menambahkan variabel kualitas audit karena menurut (Fahmi, 2018: 34) kreditur selalu melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan sebelum memberikan pinjaman kepada debitur. Laporan keuangan yang diaudit *Big 4* dinilai berkualitas (Prasetyo dan Raharja, 2013). Kemudian peneliti tertarik untuk menambahkan variabel kepemilikan keluarga karena kecenderungan perusahaan keluarga dalam menggunakan utang untuk

memenuhi kebutuhan operasional menyebabkan beberapa dari perusahaan keluarga mengalami kebangkrutan. Ketertarikan penulis diikuti dengan survey yang dilakukan oleh PwC tahun 2014 menyatakan bahwa 95% perusahaan di Indonesia merupakan perusahaan keluarga. Kemudian variabel kepemilikan institusional tetap diteliti karena sebagian besar saham perusahaan publik khususnya pada sektor manufaktur dimiliki oleh pihak institusi.

Kedua, perbedaan penelitian ini dengan Chiu dan Wang (2019) di Taiwan terletak pada indikator kepemilikan keluarga. Dalam penelitian Chiu dan Wang (2019) mengukur kepemilikan keluarga dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan dengan kepemilikan keluarga dan 0 untuk perusahaan dengan kepemilikan non keluarga. Sedangkan dalam penelitian ini, mengukur kepemilikan keluarga dengan memberikan nilai 1 untuk $\geq 20\%$ saham yang dimiliki keluarga dan memberikan nilai 0 untuk $< 20\%$ saham yang dimiliki keluarga.

Ketiga, perbedaan penelitian ini dengan Causholli dan Knechel (2012) di Amerika Serikat terletak pada indikator biaya utang. Pergitungan biaya utang dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Tee (2017) di Malaysia dan Swissia dan Purba (2018) di Indonesia. Keempat, penelitian ini dilakukan di Indonesia khususnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan pemilihan populasi pada perusahaan manufaktur adalah karena perusahaan manufaktur merupakan salah satu bagian sektor yang terbesar di Indonesia dengan saham yang banyak dimiliki oleh pihak institusi dengan kepemilikan keluarga yang tinggi.

Kelima, peneliti mengambil tahun amatan 2015-2017 karena menurut survey yang dilakukan bps kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB sebesar 20,84 persen pada tahun 2015 dan terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya (sumber:sirusa.bps.go.id). Kemudian, pada tahun 2015-2017 ada beberapa diantara perusahaan manufaktur yang mengalami *delisting* karena terlilit utang.

Berdasarkan uraian-urain diatas, maka peneliti akan mengangkat dan membahas permasalahan dengan judul **“Pengaruh Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Biaya Utang (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah penelitian adalah:

1. Apa alasan manajemen mengambil keputusan untuk berhutang?
2. Apa yang menyebabkan biaya utang perusahaan meningkat?
3. Apa akibat yang ditanggung perusahaan saat biaya utang terlalu tinggi?
4. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap biaya utang?
5. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap biaya utang?
6. Bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga terhadap biaya utang?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penelitian ini hanya terbatas pada masalah yang menyangkut **“Pengaruh Kualitas Audit, Kepemilikan**

Institusional, dan Kepemilikan Keluarga terhadap Biaya Utang Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017”.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diidentifikasi diatas, dapat dirumuskan masalah yang mempengaruhi penelitian ini adalah:

1. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017?
3. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017?
4. Apakah kualitas audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris apakah kualitas audit berpengaruh terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017.

2. Untuk memperoleh bukti empiris apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017.
3. Untuk memperoleh bukti empiris apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017.
4. Untuk memperoleh bukti empiris apakah kualitas audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam melihat pengaruh kualitas audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga dalam mengelola biaya utang dalam suatu perusahaan.
- 2) Bagi peneliti
Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti mengenai pengaruh kualitas audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga terhadap biaya utang
- 3) Bagi Universitas Negeri Medan

Sebagai tambahan literatur tentang pengembangan ilmu akuntansi, khususnya terkait dengan biaya utang

4) Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan atau referensi untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh kualitas audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga terhadap biaya utang

